**ABSTRAK**

Penelitian dalam kegiatan magang ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis tentang **“Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan PMKS Daerah tersebut serta faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dimiliki.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam pengamatan ini ditujukan kepada para pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Ujungberungsejauh ini sudah dapat terlaksana dengan baik dilihat dari adanya landasan hukum yang mengatur pelaksanaan Pemberdayaan PMKS; dibentuknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; partisipasi masyarakat baik secara moril dan materiil; sumberdaya peralatan yang memadai; adanya insentif yang diberikan; hubungan dengan unit lain sebagai bentuk kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan Pemberdayan PMKS. Namun, masih terdapat hambatan berupa ketidaksesuaian antara program kegiatan yang diajukan; intervensi lebih dari Lurah; lambannya proses pencairan dana; keterbatasan personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;Watak dan Mental PMKS yang sulit diarahkan; kurangnya pengawasan dan evaluasi dari Tim Pengawas.

Pada bagian akhir Laporan Akhir ini penulis mengemukakan beberapa saran untuk diperhatikan Pemerintah Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat mengadakan program lainnya yang tetap berbasis pada pemerataan, pemberdayaan, dan kebersamaan masyarakat; melakukan evaluasi dan monitoring secara tegas dan berkelanjutan; melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Bagi Pelaksana Kebijakan, kinerja harus lebih ditingkatkan dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program. Bagi Masyarakat Sebagai Sasaran Kebijakan masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pembangunan, Pemberdayaan

***ABSTRACT***

*Research in apprenticeship aimed to observe and analyze about the* ***"Implementation Regulations of Bandung City Mayor Number 436 2015 on the implementation of the Program of innovation development and empowerment of the cantonal Parliament (Studies in district Ujungberung Bandung of West Java province)".*** *This research aimed to find out how the implementation of these local regulations as well as the factors restricting and supporters.*

*The methods used in this research was exploratory method with inductive approach. The technique of data collection was done with the interview, observation and documentation. Interview conducted in these observations addressed to the implementers of policy and society as target policies.*

*Research results showed that Implementation of Bandung City Mayor Number 436 2015 on the Implementation of the Program of innovation development and Empowerment, and village in Kecamatan Ujungberung within nearly two years have been concluded good from the existence of a legal basis regulating the implementation of PIPPK; the establishment of the Steering Team PIPPK; community participation both in moral and material; resources adequate equipment; the incentives given for implementing the policy; relationship with other units as a form of cooperation and support in the implementation of PIPPK. But, there were obstacles such as mismatch between program activities submitted; the presence of intervention over Head; the slow process of disbursement; Civic Wards Institution personnel limitations; submission of proposal online was considered difficult for some policy actors; lack for supervision and evaluation from the TP-PIPPK.*

*At the end of this final report the author suggests some advice for the Government of the city of Bandung as the policymakers to hold other programs based on equity, empowerment, and solidarity of the community; conduct evaluation and monitoring firmly and sustainably; doing the socialization and training of about PIPPK. For the policymakes should be improve the performance of the policy and has a high commitment towards the implementation of the program. For the community as a Policy Target that community can play an active role in the implementation of the program.*

*Keywords: Implementation, Local Regulations, Development, Empowerment*